

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Azwar, Saifudin, 2005, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Basuki, Sulisty, 2006, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Jakarta.
- Fajar dan Yulianto Achmad, Mukti, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- HS Salim, 2016, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hutagalung, Arie S, 2005, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Khoidin, M., 2005, *Dimensi Hukum Hak Tanggungan Atas Tanah*, LaksBang Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika-Universitas Terbuka, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasution, S. 2003. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Parlindungan, A.P, 1999, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Santoso, Urip, 2010, *Pendaftaran Hak Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 2011, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset Yogyakarta, Yogyakarta.

Supramono, Gatot, 2009, *Perbankan Dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2011, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainal Asikin, Amirudin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893).

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 349).

C. Sumber-sumber lain

Harsono Boedi, 2007, *PPAT Sejarah Tugas dan Kewenangannya*, Majalah Renvoi, No.8.44.IV, Jakarta.

I Putu Arwan Puspa Resmawan, 2018, "*Implikasi Pendaftaran Hak Tanggungan Berbasis Komputerisasi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung*", Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Widya Astuti, 2018, "*Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yang Terlambat atau Tidak Melaksanakan Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang Telah Dibuatnya*", Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Winarsih Sri, 2002, *Pengaturan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pejabat Umum*, Majalah YURIDIKA, Vol.17 No.2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Sukmadinata, "Metodologi-penelitian-hukum-2/", <https://idtesis.com/> diakses pada tanggal 26 Januari 2021 pada pukul 12.52 WIB